

Humanisme Tauhidi Ali Syari'ati dan Relevansinya terhadap Pemberontakan Petani Banten 1888

Ahmad Baharuddin Hanafi

UIN Sunan Ampel Surabaya

ahmadbaharuddinhanafi@gmail.com

Wasid

UIN Sunan Ampel Surabaya

wasid@uinsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep humanisme tauhidi Ali Syari'ati dan relevansinya dalam memahami peristiwa Pemberontakan Petani Banten 1888 sebagaimana ditulis oleh Sartono Kartodirdjo. Humanisme tauhidi merupakan konsep kemanusiaan yang berpijak pada prinsip tauhid, di mana Tuhan menjadi pusat nilai dan manusia berperan sebagai khalifah yang bertanggung jawab menegakkan keadilan sosial. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis pustaka, penelitian ini mengkaji karya Ali Syari'ati yang membahas dimensi spiritual dan sosial manusia, kemudian membandingkannya dengan konteks sosial historis perlawanan rakyat Banten terhadap penindasan kolonial. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlawanan petani Banten tidak semata reaksi spontan terhadap penderitaan ekonomi, tetapi mencerminkan kesadaran moral dan spiritual sebagaimana dimaknai dalam kerangka humanisme tauhidi Ali Syari'ati. Kesadaran ini menegaskan pentingnya iman yang aktif, yakni iman yang diwujudkan dalam perjuangan menegakkan kemanusiaan dan keadilan. Dalam konteks Indonesia modern, nilai-nilai humanisme tauhidi tetap relevan sebagai paradigma pembebasan sosial yang menolak ketimpangan dan dehumanisasi struktural. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perpaduan antara kajian historis dan pemikiran teologis dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika perjuangan rakyat terhadap ketidakadilan.

Kata kunci: *Ali Syari'ati, Humanisme, Islam, Keadilan, Pemberontakan.*

PENDAHULUAN

Ketidakadilan sosial merupakan persoalan yang terus berulang dalam sejarah peradaban manusia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menyangkut ketimpangan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan sistem kekuasaan, struktur sosial, dan kesadaran moral masyarakat. Di tengah perubahan sosial yang cepat, isu ketimpangan semakin nyata terlihat melalui maraknya kemiskinan struktural, eksploitasi tenaga kerja, hingga marginalisasi kelompok lemah. Menurut laporan di *NU Online* (Rohman, 2025), demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada Agustus 2025 di berbagai daerah di Indonesia mencerminkan akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap ketimpangan sosial-ekonomi dan lemahnya perlindungan bagi pekerja urban. Peristiwa

tersebut memperlihatkan bahwa keadilan sosial masih menjadi cita-cita yang belum terwujud, meskipun telah lebih dari tujuh dekade bangsa ini merdeka. Masalah ketidakadilan sosial bukan hanya fenomena modern, melainkan juga bagian dari pengalaman historis bangsa. Salah satu peristiwa yang merepresentasikan penderitaan rakyat akibat ketimpangan struktural adalah Pemberontakan Petani Banten 1888, yang dikaji secara mendalam oleh Sartono Kartodirdjo (1984) dalam karyanya *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Peristiwa tersebut lahir dari akumulasi penindasan ekonomi, sosial, dan politik di bawah sistem kolonial Hindia Belanda. Para petani Banten menghadapi tekanan berat akibat pajak tanah, sistem tanam paksa, serta kebijakan Agrarische Wet 1870 yang membuka jalan bagi penguasaan tanah oleh perusahaan asing. Ketidakadilan tersebut diperparah oleh kesenjangan sosial antara pejabat kolonial dan rakyat kecil. Namun di balik penderitaan itu, muncul kesadaran spiritual yang kuat, terutama melalui peran para ulama seperti Haji Wasid, yang menggerakkan rakyat atas dasar ajaran Islam dan semangat keadilan (Alpianti dkk., 2023). Dalam konteks pemikiran Islam modern, Ali Syari'ati (1933–1977) adalah salah satu tokoh yang menawarkan kerangka konseptual untuk memahami hubungan antara iman, kesadaran sosial, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Ia memperkenalkan konsep humanisme tauhidi, sebuah gagasan yang memadukan nilai ketuhanan (tauhid) dengan kesadaran kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Menurut Maliki (2020), Syari'ati menolak humanisme sekuler Barat yang memisahkan manusia dari nilai-nilai transendental, dan sebaliknya menegaskan bahwa kemanusiaan sejati hanya dapat dibangun dalam bingkai tauhid, di mana seluruh manusia memiliki kedudukan setara di hadapan Tuhan. Pandangan ini menempatkan iman bukan sekadar keyakinan pribadi, tetapi sebagai kekuatan ideologis yang membebaskan manusia dari struktur penindasan sosial.

Negara dan Muhlas (2023) menjelaskan bahwa dalam pandangan Syari'ati, tauhid tidak hanya bermakna teologis, melainkan juga sosial. Ia menghapus segala bentuk hierarki yang menindas, baik dalam bentuk kapitalisme, kolonialisme, maupun feodalisme. Dalam kerangka ini, ketidakadilan sosial adalah bentuk syirik sosial, karena menempatkan manusia lain sebagai penguasa atas sesamanya. Pandangan tersebut menegaskan bahwa keimanan sejati harus diwujudkan melalui tindakan sosial yang membela kaum tertindas. Dengan demikian, konsep humanisme tauhidi tidak hanya relevan dalam tataran spiritual, tetapi juga menjadi landasan etis bagi perjuangan sosial dan politik. Secara lebih mendalam, Shofa (2012) dan Nirwansyah (2019) menyoroti bahwa bagi Syari'ati, manusia adalah makhluk bebas yang diberi kemampuan berpikir, berkreasi, dan memilih. Kebebasan tersebut menjadi pangkal bagi tanggung jawab moral manusia untuk menegakkan keadilan. Ego manusia yang berlebihan justru menjadi “penjara batin” yang memisahkan manusia dari hakikat kemanusiaannya sendiri. Oleh sebab itu, manusia harus keluar dari penjara ego untuk menemukan kembali kesadaran ilahiah dan tanggung jawab sosialnya. Dalam konteks sosial Indonesia, kesadaran semacam ini sangat relevan untuk menjawab persoalan

dehumanisasi akibat ketimpangan ekonomi dan krisis moral yang melanda masyarakat modern.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengulas gagasan Syari'ati dari beragam perspektif. Ummah (2020) menekankan aspek teologi pembebasan dalam pemikiran Syari'ati yang menuntut transformasi ajaran agama dari sekadar ritual individual menjadi gerakan sosial yang membebaskan manusia dari penindasan. Zaman (2021) memperkuat pandangan tersebut dengan menjelaskan bahwa agama dalam pemikiran Syari'ati harus berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan dan menolak pandangan Marx yang menyebut agama sebagai “candu masyarakat”. Sementara itu, Yuwono (2022) mengkaji relevansi teologi pembebasan Syari'ati dalam konteks kemiskinan umat Islam di Indonesia dan menegaskan bahwa sistem tauhid melahirkan pandangan egalitarian dan keadilan universal. Penelitian-penelitian tersebut menjadi dasar penting dalam memahami relevansi humanisme tauhidi terhadap isu sosial dan ekonomi di dunia Islam. Namun, penelitian ini berbeda dari studi-studi sebelumnya karena berusaha menghubungkan gagasan humanisme tauhidi Ali Syari'ati dengan konteks historis dan sosial Indonesia, khususnya melalui analisis terhadap Pemberontakan Petani Banten 1888. Kajian ini berupaya menunjukkan bahwa kesadaran spiritual dan perjuangan sosial dalam peristiwa tersebut memiliki makna ideologis yang sejalan dengan semangat tauhid—yakni menegakkan keadilan, menolak penindasan, dan mengembalikan martabat manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Dengan menggabungkan analisis historis dan teologis, penelitian ini berupaya menyoroti relevansi pemikiran Syari'ati sebagai paradigma alternatif dalam memahami akar dan solusi ketidakadilan sosial di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep humanisme tauhidi Ali Syari'ati dapat dijadikan kerangka analisis untuk memahami dan menanggulangi ketidakadilan sosial di Indonesia, dengan meninjau relevansinya terhadap peristiwa historis Pemberontakan Petani Banten 1888?, bagaimana relevansi pemikiran Syari'ati terhadap konteks sosial dan ketidakadilan di Indonesia?, apa kaitannya humanisme tauhidi dengan semangat perjuangan rakyat dalam Pemberontakan Petani Banten 1888? Tujuan penelitian ini adalah: yang pertama, mendeskripsikan konsep humanisme tauhidi dalam pemikiran Ali Syari'ati. Kedua menganalisis relevansi pemikiran Syari'ati terhadap konteks sosial dan ketidakadilan di Indonesia. Ketiga mengaitkan nilai-nilai humanisme tauhidi dengan semangat perjuangan rakyat dalam Pemberontakan Petani Banten 1888. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka (*library research*). Sumber data terdiri dari literatur sekunder berupa jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel yang membahas pemikiran Ali Syari'ati serta buku Pemberontakan Petani Banten 1888 karya Sartono Kartodirdjo (1984). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah keterkaitan antara konsep teoretis humanisme tauhidi dan realitas sosial-historis ketidakadilan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi Islam dan sosial, terutama dalam memperkaya wacana tentang peran iman, kesadaran, dan

tindakan sosial dalam menghadapi ketidakadilan struktural. Lebih jauh, kajian ini menegaskan bahwa konsep humanisme tauhidi Ali Syari'ati bukan hanya gagasan teoretis, tetapi juga visi moral dan spiritual yang relevan untuk membangun masyarakat Indonesia yang berkeadilan, beradab, dan berketuhanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Humanisme Tauhidi Ali Syari'ati

Ali Syari'ati merupakan salah satu pemikir Islam modern paling berpengaruh di abad ke-20 yang dikenal karena pemikiran sosial-religiusnya yang progresif dan revolusioner. Ia lahir pada 24 November 1933 di desa Mazinan, Kahak, wilayah Khurasan, Iran dan wafat pada 19 Juni 1977 di Southampton, Inggris. Ayahnya, Muhammad Taqi Syari'ati, adalah seorang ulama pembaru yang juga pendiri Pusat Penyebaran Kebenaran Islam (Centre for the Propagation of Islamic Truth), lembaga yang berperan penting dalam perkembangan pemikiran Islam modern di Iran. Latar keluarga ulama dan lingkungan religius yang kuat ini membentuk karakter intelektual dan spiritual Syari'ati, sekaligus menjadi fondasi bagi lahirnya gagasan-gagasan sosial yang berpijak pada nilai-nilai keislaman (Maliki, 2020). Humanisme yang dirumuskan oleh Ali Syari'ati bukanlah humanisme sekuler yang menempatkan manusia sebagai pusat otonomi yang terlepas dari nilai-nilai transendental. Sebaliknya, ia memperkenalkan konsep humanisme tauhidi—sebuah pandangan yang menegaskan bahwa kemanusiaan sejati hanya dapat dimaknai dalam kerangka tauhid, yaitu pengesaan Tuhan sebagai pusat segala nilai. Dalam pandangan Syari'ati, tauhid tidak hanya berarti pengakuan teologis terhadap keesaan Allah, tetapi juga kesadaran sosial bahwa seluruh manusia memiliki kesetaraan eksistensial di hadapan-Nya. Maka dari itu, segala bentuk penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan sosial merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip tauhid itu sendiri (Negara & Muhlas, 2023). Menurut Syari'ati, manusia adalah makhluk yang paling kompleks di alam semesta dan menjadi persoalan paling penting dari seluruh persoalan yang ada. “Masalah manusia adalah masalah yang paling penting dari segala masalah. Manusia merupakan makhluk yang paling rumit di alam semesta, oleh karena itu ia memerlukan pencurahan perhatian yang besar,” tulisnya dalam Tugas Cendekiawan Muslim (Nirwansyah, 2019). Pandangan ini menunjukkan bahwa inti dari seluruh ilmu pengetahuan dan agama adalah memahami hakikat manusia. Ia menolak pandangan deterministik yang menganggap manusia sebagai makhluk pasif yang dikendalikan oleh nasib atau sistem sosial. Bagi Syari'ati, manusia adalah makhluk bebas yang mampu bertindak melampaui dorongan instingtifnya; kebebasan inilah yang menjadi penghubung spiritual antara manusia dengan Tuhan (Shofa, 2012).

Lebih jauh, Syari'ati menekankan bahwa manusia sering kali terpenjara oleh egonya sendiri. Dalam uraian Nirwansyah (2019), Syari'ati menulis bahwa “ego adalah penjara yang dibawa manusia di dalam dirinya sendiri.” Penjara ini menyebabkan manusia hidup dalam absurditas dan kehilangan arah spiritualnya. Karena itu, manusia harus “keluar dari absurditas” dengan kembali pada kesadaran ilahiah, yaitu menyadari

perannya sebagai khalifah Allah di bumi. Kesadaran inilah yang menjadi inti dari humanisme tauhidi: pembebasan manusia, bukan hanya dari struktur sosial yang menindas, tetapi juga dari penjara ego dan alienasi spiritual. Syari'ati juga mengaitkan kebebasan manusia dengan tanggung jawab moral. Dalam pandangannya, kemampuan manusia untuk memilih (*hurriyatul iradah*) adalah letak keagungannya. "Memberontak adalah pilihan dan letak keagungan manusia karena ia diberi hak memilih," tulisnya sebagaimana dikutip oleh Shofa (2012). Dengan demikian, tindakan melawan penindasan dan ketidakadilan bukanlah bentuk pemberontakan terhadap Tuhan, melainkan bentuk aktualisasi kemanusiaan sejati. Dalam kerangka ini, humanisme tauhidi menegaskan bahwa iman sejati tidak hanya diwujudkan dalam ritual keagamaan, tetapi juga dalam tindakan sosial yang membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Lebih lanjut, Syari'ati merumuskan prinsip dasar dalam humanisme tauhidi, yaitu bahwa manusia adalah makhluk bebas, berakal, kreatif, dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ia menegaskan bahwa manusia sejati adalah manusia yang sadar akan misinya di dunia sebagai khalifah, bukan sekadar makhluk yang mengejar kepentingan pribadi. Dengan demikian, humanisme tauhidi menggambarkan manusia sebagai subjek aktif yang berjuang untuk membangun kehidupan yang adil dan beradab (Negara & Muhlas, 2023). Humanisme tauhidi Ali Syari'ati bukan hanya gagasan filosofis, tetapi juga dasar ideologis dari perjuangan sosialnya di Iran pada 1950–1970-an. Ia terlibat aktif dalam gerakan pembebasan rakyat dari penindasan monarki Syah Pahlevi, namun berbeda dari kelompok radikal yang memilih kekerasan. Bagi Syari'ati, revolusi sejati lahir dari kesadaran spiritual dan kemanusiaan, bukan sekadar perebutan kekuasaan (Kholil, 2023). Dengan demikian, konsep humanisme tauhidi bukan hanya seruan moral, tetapi juga strategi pembebasan sosial yang memadukan iman, ilmu, dan aksi.

Melalui pemikiran ini, Syari'ati menunjukkan bahwa keimanan dan kemanusiaan tidak dapat dipisahkan. Humanisme tanpa tauhid akan kehilangan arah spiritualnya, sedangkan tauhid tanpa humanisme akan kehilangan makna sosialnya. Dengan demikian, humanisme tauhidi menjadi jalan tengah yang mempersatukan dimensi spiritual dan sosial manusia, serta menawarkan kerangka etis untuk menentang segala bentuk penindasan atas nama kemanusiaan dan keadilan.

Ketidakadilan Sosial di Indonesia dan Pemberontakan Petani Banten 1888

Ketidakadilan sosial merupakan persoalan historis yang terus berulang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejak masa kolonial hingga era kontemporer, ketimpangan ekonomi, politik, dan sosial telah menjadi faktor utama yang melahirkan gejolak di tengah masyarakat. Dalam konteks sejarah, bentuk-bentuk ketidakadilan sering muncul melalui eksploitasi ekonomi, dominasi kekuasaan, serta marginalisasi kelompok bawah seperti petani dan buruh (Kartodirdjo, 1984). Fenomena tersebut tidak hanya terbatas pada masa lampau, tetapi juga tampak dalam kondisi sosial Indonesia saat ini. Laporan Program Studi Sosiologi Universitas Nasional (Unas) yang diterbitkan oleh NU Online (Rohman, 2025) menunjukkan bahwa gelombang demonstrasi nasional pada Agustus 2025 dipicu oleh akumulasi ketidakadilan sosial-ekonomi, meningkatnya pengangguran,

serta lemahnya perlindungan terhadap pekerja urban. Kasus kematian Affan Kurniawan—seorang pengemudi ojek daring yang tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob—menjadi simbol ketimpangan struktural dan ketiadaan jaminan sosial bagi kelas pekerja perkotaan. Data ini memperlihatkan bahwa ketimpangan yang dialami rakyat kecil masih bersifat sistemik dan berulang, sebagaimana yang dialami para petani Banten pada masa kolonial. Salah satu contoh historis paling representatif dari ketimpangan sosial tersebut ialah Pemberontakan Petani Banten 1888. Sartono Kartodirdjo (1984) menjelaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan hasil akumulasi tekanan sosial, ekonomi, dan religius yang dialami rakyat Banten. Petani menghadapi eksploitasi pajak, monopoli hasil bumi, serta korupsi pejabat lokal yang bersekutu dengan pemerintah kolonial. Dalam kondisi demikian, ajaran Islam menjadi sumber kekuatan moral dan spiritual yang menumbuhkan kesadaran kolektif untuk melawan penindasan. Namun perjuangan mereka ditindas secara represif dan diberi label sebagai pemberontakan fanatik oleh pemerintah kolonial.

Menurut penelitian Putri Rijkia Alpianti dkk. (2023) dalam Jurnal Cendikia Pendidikan, terdapat lima faktor utama penyebab pemberontakan tersebut. Pertama, faktor geografis: wilayah Banten yang strategis dan subur menjadi target utama eksploitasi kolonial, terutama setelah kebijakan Agrarische Wet 1870 yang membuka jalan bagi penguasaan tanah oleh perusahaan asing. Bencana letusan Gunung Krakatau tahun 1883 memperburuk kondisi sosial ekonomi petani. Kedua, faktor sosial: kesenjangan antara rakyat kecil dengan pejabat kolonial dan tuan tanah menimbulkan ketidakpuasan yang meluas. Ketiga, faktor ekonomi: sistem tanam paksa dan pajak tanah yang tinggi menyebabkan kemiskinan struktural di kalangan petani. Keempat, faktor politik: hilangnya representasi rakyat dalam pemerintahan kolonial memperkuat rasa ketidakadilan. Kelima, faktor agama dan budaya: semangat keislaman menjadi pendorong utama perlawanan, terutama melalui peran ulama seperti Haji Wasid yang memimpin gerakan “jihad melawan kafir” (Alpianti dkk., 2023) Jika ditinjau dari perspektif sosial, peristiwa Banten 1888 mencerminkan ketimpangan struktural yang membuat kelas bawah kehilangan ruang partisipasi politik. Situasi tersebut sejajar dengan kondisi masyarakat modern yang masih dihadapkan pada ketimpangan ekonomi dan lemahnya jaminan sosial. Oleh karena itu, pemberontakan Banten dapat dipahami bukan sekadar sebagai insiden lokal masa lalu, melainkan refleksi dari konflik abadi antara kekuasaan yang menindas dan aspirasi kemanusiaan untuk kebebasan dan keadilan sosial.

Dalam konteks ini, gagasan Ali Syari’ati memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami dinamika kesadaran sosial dalam peristiwa semacam itu. Menurut Syari’ati, perubahan sosial tidak dapat terjadi tanpa adanya kesadaran ideologis. Ia menegaskan bahwa manusia yang menyadari posisinya di dunia dan memiliki ideologi yang benar akan mampu menolak penindasan. Ideologi, bagi Syari’ati, bukan sekadar sistem ide, tetapi pedoman hidup yang menuntut keyakinan, tanggung jawab, dan keterlibatan aktif dalam realitas sosial (Ummah, 2020). Pandangan

ini memperkuat pemahaman bahwa perlawanan petani Banten bukan hanya reaksi emosional, melainkan ekspresi kesadaran kolektif terhadap struktur sosial yang tidak adil. Dengan demikian, pemberontakan Petani Banten 1888 dapat dimaknai sebagai manifestasi kesadaran spiritual dan sosial dalam menegakkan keadilan. Perlawanan ini menunjukkan bahwa rakyat, ketika ditekan oleh sistem yang menindas, mampu melahirkan kesadaran ideologis yang membebaskan. Perspektif ini membuka jalan bagi pembacaan baru terhadap peristiwa sejarah tersebut melalui lensa humanisme tauhidi Ali Syari'ati, di mana iman dan kesadaran menjadi dasar perjuangan sosial yang membebaskan manusia dari dehumanisasi struktural.

Analisis Pemberontakan Petani Banten 1888 dalam Perspektif Humanisme Tauhidi Ali Syari'ati

Pemberontakan Petani Banten 1888 sebagaimana dikaji oleh Sartono Kartodirdjo (1984) merupakan potret nyata ketegangan antara kekuasaan kolonial dan rakyat tertindas. Dalam kerangka pemikiran humanisme tauhidi Ali Syari'ati, peristiwa ini dapat dimaknai bukan sekadar sebagai ledakan spontan akibat tekanan ekonomi, tetapi sebagai ekspresi spiritual manusia yang menolak penindasan. Syari'ati menegaskan bahwa manusia sejati adalah mereka yang memiliki kesadaran ilahiah dan menentang segala bentuk kezaliman karena penindasan berarti meniadakan martabat manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi (Kholil, 2023). Dalam pemikiran Syari'ati, tauhid tidak hanya bermakna pengakuan teologis terhadap keesaan Tuhan, tetapi juga kesatuan sosial yang menuntut dihapuskannya struktur yang menindas. Tauhid berarti menegasikan segala bentuk “tuhan-tuhan palsu” berupa kekuasaan, kapital, dan status sosial yang memperbudak manusia. Oleh sebab itu, dalam konteks pemberontakan Banten, perlawanan petani terhadap kolonialisme merupakan manifestasi dari kesadaran tauhidi, yakni perjuangan untuk memulihkan kemanusiaan yang sejati di bawah nilai ilahi (Negara & Muhlas, 2023). Pemikiran ini selaras dengan pandangan Syari'ati dalam konteks teologi pembebasan, sebagaimana dijelaskan oleh Zaman (2021), bahwa agama harus ditransformasikan dari sekadar ajaran etika pribadi menjadi program revolusioner yang mengubah realitas sosial. Syari'ati menolak pandangan Barat, seperti Marx yang menganggap agama sebagai “candu masyarakat”. Baginya, agama justru harus menjadi kekuatan ideologis yang membebaskan manusia dari penindasan dan menggerakkan kesadaran kolektif menuju keadilan sosial. Dalam hal ini, gerakan perlawanan rakyat Banten dapat dilihat sebagai wujud nyata dari “agama yang hidup”, agama yang melahirkan komitmen moral dan tindakan sosial.

Selain itu, Ummah (2020) menjelaskan bahwa seluruh pandangan Syari'ati berakar dari prinsip tauhid yang memandang alam semesta sebagai satu kesatuan. Tidak ada dikotomi antara dunia dan akhirat, materi dan spiritual, sebab seluruhnya merupakan manifestasi dari keesaan Tuhan. Pandangan tauhid seperti ini mendorong manusia untuk menyadari perannya sebagai khalifah Allah, yang memiliki kebebasan menentukan nasibnya sendiri sekaligus tanggung jawab untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Kesadaran inilah yang menjadi dasar spiritual gerakan sosial, termasuk

dalam konteks perlawanan petani terhadap sistem kolonial yang menindas. Lebih jauh, Syari'ati menegaskan bahwa teologi bukan sekadar ilmu tentang Tuhan, tetapi harus menjadi sarana pembebasan manusia dari keterpurukan sosial. Yuwono (2022) menekankan bahwa dalam teologi pembebasan Syari'ati, sistem tauhid menjadi landasan bagi seluruh interaksi sosial dan moral. Kesatuan antara Tuhan, manusia, dan alam berarti bahwa segala bentuk diskriminasi sosial dan ketidakadilan harus dilawan. Tauhid melahirkan pandangan egalitarian bahwa semua manusia memiliki hak yang sama atas keadilan dan kesejahteraan. Dalam perspektif ini, perjuangan petani Banten melawan ketidakadilan kolonial dapat dilihat sebagai cerminan nyata dari semangat tauhid yang hidup dalam kesadaran rakyat. Dalam konteks sosial modern, gagasan humanisme tauhidi Syari'ati juga memberikan refleksi kritis terhadap fenomena ketidakadilan struktural di Indonesia. Kasus-kasus seperti kriminalisasi buruh, nelayan miskin, atau kematian pekerja urban (Indrawan, 2017; Rohman, 2025) memperlihatkan bahwa sistem sosial yang menindas masih beroperasi hingga kini. Dalam pandangan Syari'ati, sistem yang membiarkan penindasan berarti telah kehilangan ruh tauhid. Oleh karena itu, humanisme tauhidi menuntut agar iman diwujudkan dalam aksi sosial yang konkret untuk membebaskan sesama manusia.

Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pemberontakan Petani Banten 1888 merupakan manifestasi historis dari kesadaran tauhidi dalam bentuk perjuangan sosial. Petani Banten tidak hanya melawan penindasan ekonomi, tetapi juga berusaha memulihkan martabat manusia dalam kerangka keimanan. Dengan demikian, peristiwa tersebut bukan sekadar catatan sejarah, tetapi cermin dari perjuangan spiritual manusia yang memperjuangkan keadilan sebagai bagian dari penghambaan kepada Tuhan. Inilah esensi iman yang aktif, sebagaimana ditegaskan Syari'ati—iman yang tidak berhenti pada ritual, tetapi diwujudkan dalam pembelaan terhadap kemanusiaan.

Solusi Humanisme Tauhidi Ali Syari'ati terhadap Ketidakadilan Sosial

Pemikiran Ali Syari'ati tidak hanya berhenti pada kritik terhadap struktur sosial yang menindas, tetapi juga menawarkan solusi yang bersifat teologis, moral, dan praksis. Bagi Syari'ati, penyelesaian terhadap ketidakadilan sosial tidak dapat dicapai melalui reformasi politik semata, melainkan harus berakar pada kesadaran spiritual manusia sebagai makhluk tauhid. Tauhid menjadi fondasi moral dan ideologis yang menegaskan bahwa segala bentuk penindasan adalah bentuk penyekutuan terhadap Tuhan (syirik sosial), karena menempatkan manusia lain sebagai “penguasa” atas manusia yang seharusnya merdeka (Yuwono, 2022). Dalam konteks ini, Syari'ati mengajarkan bahwa manusia sejati adalah yang memiliki iman aktif, yaitu iman yang diwujudkan melalui tindakan pembebasan terhadap sesama. Iman tidak boleh berhenti pada tataran teologis, tetapi harus mendorong tindakan sosial yang menegakkan keadilan. Ia menolak sikap pasif dan fatalistik yang sering lahir dari pemahaman agama yang sempit. Menurutnya, kesalehan sejati terletak pada keberanian untuk melawan ketidakadilan dan menegakkan martabat manusia (Zaman, 2021). Pandangan ini

menjadikan humanisme tauhidi sebagai etika revolusioner yang menggabungkan iman, kesadaran, dan aksi sosial.

Kesadaran Spiritual dan Pendidikan Humanistik

Salah satu solusi utama yang diajukan Syari'ati adalah pembangunan kesadaran tauhidi melalui pendidikan humanistik. Dalam pandangannya, pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada teknokrasi dan kompetensi ekonomi, tetapi harus membentuk manusia yang sadar akan tanggung jawab sosial dan spiritualnya. Pendidikan harus menjadi sarana pembebasan manusia dari kebodohan, penindasan, dan dehumanisasi (Kholil, 2023). Syari'ati menyebut bahwa kebebasan berpikir dan kemauan bebas (*hurriyatul iradah*) adalah puncak keagungan manusia. Manusia memiliki kapasitas untuk memilih, melawan dorongan instingnya, dan menentukan arah hidupnya dengan kesadaran moral (Shofa, 2012). Dengan demikian, pendidikan yang berlandaskan tauhid harus mengajarkan keberanian untuk berpikir kritis terhadap sistem yang menindas dan membangun solidaritas sosial.

Dalam konteks modern Indonesia, pendidikan berbasis humanisme tauhidi dapat menjadi solusi terhadap ketimpangan sosial dan kemunduran moral. Sistem pendidikan perlu menanamkan kesadaran bahwa setiap bentuk ketidakadilan ekonomi atau diskriminasi sosial adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip tauhid. Pendidikan yang mencerahkan berarti membangunkan manusia dari keterasingan spiritual dan sosial, sebagaimana yang dikehendaki oleh Syari'ati dalam cita-cita revolusi kesadaran.

Solidaritas Sosial dan Gerakan Kemanusiaan

Solusi kedua yang ditekankan Syari'ati adalah pentingnya solidaritas sosial sebagai manifestasi dari iman yang hidup. Manusia, menurutnya, tidak dapat menjalankan fungsi kekhalifahan secara individual; tanggung jawab tersebut bersifat kolektif dan harus diwujudkan dalam bentuk perjuangan sosial. Ia memandang masyarakat sebagai satu tubuh yang terhubung oleh nilai-nilai tauhid, sehingga penderitaan satu bagian harus menjadi keprihatinan bersama (Ummah, 2020). Dalam pandangan ini, perjuangan rakyat Banten 1888 menjadi teladan historis solidaritas sosial yang dilandasi nilai keimanan. Para petani yang tertindas bersatu melawan sistem kolonial yang tidak adil, menegaskan nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan. Dalam konteks kekinian, nilai serupa perlu dihidupkan kembali melalui penguatan masyarakat sipil, gerakan sosial yang berkeadilan, dan kebijakan publik yang berpihak pada kelompok marjinal.

Syari'ati juga memperingatkan bahaya egoisme sosial, di mana individu kehilangan kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Menurut Nirwansyah (2019), ego adalah “penjara” batin yang memisahkan manusia dari kemanusiaannya sendiri. Oleh karena itu, pembebasan sejati hanya dapat dicapai ketika manusia keluar dari penjara ego dan menyatu dengan perjuangan kolektif untuk keadilan sosial.

Tauhid sebagai Prinsip Keadilan Transendental

Solusi terakhir yang ditawarkan Syari'ati adalah penerapan tauhid sebagai prinsip keadilan transendental. Ia menolak pemisahan antara spiritualitas dan politik, karena menurutnya, iman sejati selalu berimplikasi sosial. Tauhid tidak hanya berbicara tentang hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia. Dalam konsep ini, penegakan keadilan sosial adalah bagian dari penghambaan kepada Allah (Yuwono, 2022). Adhimas Yuwono (2022) menegaskan bahwa teologi pembebasan Syari'ati mengandung makna egalitarianisme dan kesetaraan universal. Setiap manusia memiliki martabat yang sama karena berasal dari Tuhan yang satu. Oleh karena itu, segala bentuk ketimpangan ekonomi dan diskriminasi sosial merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip tauhid. Dengan menjadikan tauhid sebagai pandangan dunia, umat manusia dapat membangun tatanan sosial yang berkeadilan dan berkeadaban.

Dalam konteks bangsa Indonesia, hal ini relevan dengan tantangan kontemporer seperti kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, dan hilangnya kepekaan moral elite politik. Negara yang berlandaskan nilai tauhid harus berfungsi sebagai pelindung dan pengayom rakyatnya, bukan sebagai instrumen penindasan. Keadilan sosial yang sejati adalah keadilan yang lahir dari kesadaran spiritual, bukan sekadar administrasi hukum.

Sintesis dari Kesadaran Menuju Aksi Pembebasan

Pada akhirnya, solusi humanisme tauhidi Ali Syari'ati menuntut transformasi dari kesadaran menuju aksi. Kesadaran spiritual harus diiringi dengan keberanian moral untuk menegakkan keadilan. Iman tanpa perjuangan adalah ilusi, sementara perjuangan tanpa iman kehilangan arah moralnya. Dalam kerangka ini, humanisme tauhidi mengajarkan keseimbangan antara pemikiran dan tindakan, antara spiritualitas dan revolusi sosial. Sebagaimana diungkapkan Syari'ati, tugas manusia bukan hanya menyembah Tuhan, tetapi juga membebaskan sesama manusia dari segala bentuk perbudakan—baik ekonomi, politik, maupun ideologis. Dengan demikian, konsep humanisme tauhidi tidak hanya menjadi wacana teologis, tetapi juga proyek kemanusiaan universal yang relevan untuk menjawab krisis sosial dan moral dunia modern.

KESIMPULAN

Pemikiran Ali Syari'ati tentang humanisme tauhidi menawarkan sintesis unik antara dimensi spiritual dan sosial dalam memahami eksistensi manusia. Dalam pandangan Syari'ati, manusia bukanlah makhluk pasif yang terikat pada nasib atau sistem, melainkan subjek aktif yang diberi kebebasan, kesadaran, dan tanggung jawab moral untuk menentukan arah kehidupannya. Ia menolak pandangan sekuler Barat yang memisahkan manusia dari nilai-nilai ketuhanan, sekaligus mengkritik bentuk keberagamaan yang hanya menekankan ritual tanpa aksi sosial. Dengan demikian, humanisme tauhidi hadir sebagai paradigma teologis dan filosofis yang menegaskan kesatuan antara iman, kesadaran, dan perjuangan sosial. Bagi Syari'ati, inti dari tauhid

bukan hanya pengakuan terhadap keesaan Tuhan, melainkan kesadaran eksistensial bahwa seluruh realitas—manusia, alam, dan Tuhan—merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Kesadaran tauhidi ini membebaskan manusia dari belenggu dualisme dunia-akhirat, spiritual-material, dan individu-sosial. Dengan pandangan semesta yang integral tersebut, manusia dipanggil untuk bertanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi, yakni menjaga keadilan, menegakkan kemanusiaan, dan menolak segala bentuk penindasan. Dalam konteks ini, Syari'ati menganggap bahwa ketidakadilan sosial bukan sekadar problem ekonomi atau politik, tetapi bentuk syirik sosial, karena menempatkan manusia lain sebagai “tuhan” yang menindas sesamanya (Yuwono, 2022). Dari gagasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa humanisme tauhidi Syari'ati memiliki dua fungsi pokok: fungsi teologis dan fungsi sosial. Fungsi teologisnya menegaskan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, di mana tauhid menjadi pusat orientasi moral dan spiritual. Sedangkan fungsi sosialnya menegaskan hubungan horizontal manusia dengan sesamanya, di mana tauhid mengandung implikasi egalitarian: semua manusia setara di hadapan Tuhan dan memiliki martabat yang sama. Kesetaraan ini, menurut Syari'ati, harus diwujudkan dalam bentuk perjuangan nyata untuk melawan struktur sosial yang menindas dan menciptakan ketidakadilan (Zaman, 2021).

Konsep tersebut menjadikan teologi tidak lagi berhenti pada wilayah metafisis, melainkan menjadi kekuatan ideologis yang membebaskan manusia dari keterpurukan. Inilah yang disebut Syari'ati sebagai “agama yang hidup”—agama yang tidak hanya berbicara tentang keselamatan akhirat, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial di dunia. Agama dalam pandangan Syari'ati harus menjadi kekuatan revolusioner yang menggerakkan manusia menuju keadilan dan kemanusiaan universal. Dalam kerangka ini, iman dan aksi tidak dapat dipisahkan: iman tanpa aksi adalah kemunafikan spiritual, sedangkan aksi tanpa iman kehilangan arah moralnya (Ummah, 2020). Dalam konteks Indonesia, pemikiran humanisme tauhidi Syari'ati memiliki relevansi mendalam, terutama jika dikaitkan dengan realitas ketidakadilan sosial yang masih mengakar hingga kini. Sejarah mencatat bahwa penindasan dan ketimpangan struktural telah lama menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini—mulai dari masa kolonial hingga era modern. Pemberontakan Petani Banten tahun 1888 yang dikaji oleh Sartono Kartodirdjo (1984) merupakan salah satu manifestasi historis dari kesadaran kolektif rakyat terhadap ketidakadilan. Gerakan ini bukan sekadar reaksi spontan terhadap tekanan ekonomi, melainkan ekspresi spiritual yang berakar pada ajaran Islam tentang keadilan dan pembebasan. Dalam perspektif humanisme tauhidi, perlawanan para petani tersebut mencerminkan kesadaran ilahiah manusia yang menolak diperbudak oleh struktur sosial yang zalim.

Syari'ati menekankan bahwa perubahan sosial sejati hanya dapat terwujud melalui kesadaran spiritual dan ideologis. Ia menyebut bahwa manusia yang sadar akan eksistensinya sebagai hamba Allah tidak akan tunduk pada penindasan. Kesadaran tauhidi mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang layak disembah, sehingga segala bentuk dominasi manusia atas manusia harus dilawan. Dalam kerangka ini, perjuangan rakyat

Banten dapat dibaca sebagai bentuk praksis tauhidi: tindakan sosial yang dilandasi oleh iman dan kesadaran moral. Mereka tidak hanya menuntut keadilan ekonomi, tetapi juga memperjuangkan martabat kemanusiaan sebagai bagian dari penghambaan kepada Allah (Ummah, 2020; Zaman, 2021). Selain relevansi historis, gagasan Syari'ati juga memberikan panduan normatif bagi kehidupan sosial kontemporer. Dalam dunia modern yang didominasi oleh kapitalisme, materialisme, dan individualisme, nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan kian terpinggirkan. Akibatnya, terjadi alienasi moral dan dehumanisasi dalam berbagai bentuk: kemiskinan struktural, eksploitasi buruh, ketimpangan ekonomi, hingga krisis keadilan hukum. Dalam kondisi demikian, humanisme tauhidi menjadi panggilan untuk mengembalikan orientasi manusia kepada kesadaran ilahiah. Manusia harus menyadari bahwa kebebasan sejati hanya dapat dicapai dalam pengabdian kepada Tuhan, bukan dalam dominasi terhadap sesamanya (Negara & Muhlas, 2023).

Salah satu kontribusi penting Syari'ati dalam menghadapi krisis modernitas ialah pandangannya tentang pendidikan humanistik berbasis tauhid. Ia menolak model pendidikan teknokratis yang hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi dan karier, tanpa memperhatikan pembentukan kesadaran moral. Menurut Syari'ati, pendidikan harus membebaskan manusia dari kebodohan dan penindasan, bukan menjadikannya alat sistem yang menindas. Tujuan pendidikan sejati adalah melahirkan manusia yang berpikir kritis, memiliki empati sosial, dan sadar akan tanggung jawab spiritualnya. Dengan kata lain, pendidikan harus melahirkan “manusia bebas”—yakni manusia yang mampu melampaui ego dan berpihak pada kebenaran universal (Kholil, 2023; Maliki, 2020). Selain pendidikan, Syari'ati juga menekankan pentingnya solidaritas sosial sebagai manifestasi iman yang hidup. Dalam pandangannya, masyarakat tauhidi adalah masyarakat yang egaliter, di mana penderitaan satu bagian menjadi tanggung jawab bersama seluruh umat. Egoisme sosial yang tumbuh akibat sistem kapitalistik harus dilawan melalui nilai ukhuwah dan gotong royong. Solidaritas sosial inilah yang menjadi inti dari humanisme tauhidi: kesadaran bahwa setiap tindakan untuk menolong sesama adalah bentuk penghambaan kepada Allah. Dalam konteks bangsa Indonesia, semangat ini sangat relevan untuk mengatasi krisis empati sosial dan meningkatnya kesenjangan antara kelas elite dan rakyat kecil (Nirwansyah, 2019).

Lebih jauh, Syari'ati mengajarkan bahwa tauhid adalah prinsip keadilan transendental. Ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menuntun manusia untuk menata struktur sosial yang adil. Dalam tauhid, tidak boleh ada superioritas ekonomi, ras, atau status sosial; semua manusia harus diperlakukan secara setara sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, penerapan nilai tauhid dalam kehidupan sosial-politik berarti memperjuangkan sistem yang berpihak kepada kaum lemah dan tertindas. Negara yang berlandaskan nilai tauhid tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan segelintir elit, tetapi harus menjadi pelindung seluruh rakyatnya, sebagaimana prinsip keadilan sosial dalam Pancasila (Yuwono, 2022). Dari keseluruhan gagasan ini, dapat disimpulkan bahwa pemikiran humanisme tauhidi Ali Syari'ati tidak hanya relevan bagi ranah teologi atau filsafat, tetapi juga memberikan kerangka etis dan

praksis untuk membangun masyarakat yang berkeadilan. Ia mengajarkan bahwa iman sejati adalah iman yang melahirkan tindakan, dan kemanusiaan sejati adalah kemanusiaan yang berakar pada kesadaran ilahiah. Dalam kerangka ini, keimanan tidak lagi dipisahkan dari perjuangan sosial; keduanya menjadi dua sisi dari satu kesatuan yang utuh.

Dengan demikian, warisan intelektual Ali Syari'ati menghadirkan paradigma yang visioner: bahwa pembebasan manusia dari penindasan harus dimulai dari pembebasan spiritualnya. Revolusi sejati, menurutnya, adalah revolusi kesadaran, yakni perubahan dari dalam diri manusia yang menyadari posisinya sebagai hamba sekaligus khalifah Allah. Kesadaran ini kemudian diwujudkan dalam aksi sosial yang berpihak kepada keadilan dan kemanusiaan. Melalui konsep humanisme tauhidi, Syari'ati mengajarkan kepada dunia bahwa jalan menuju masyarakat yang beradab dan berkeadilan bukanlah dengan menghapus spiritualitas dari ruang publik, melainkan dengan menanamkan nilai ketuhanan dalam setiap aspek kehidupan sosial. Iman yang hidup harus menjadi energi moral bagi transformasi sosial, dan keadilan sosial harus menjadi cermin dari penghambaan kepada Tuhan. Inilah puncak sintesis pemikiran Syari'ati: bahwa membela manusia sama dengan membela Tuhan, dan menegakkan keadilan sama dengan menegakkan tauhid.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpianti, P. R., Maulana, A., Mafulah, L., & Ribawati, E. 2023. "Petani Melawan: Sejarah Pemberontakan Petani Banten (Geger Cilegon 1888)". *Sindoro Cendikia Pendidikan*, (5): 1-10. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>
- Indrawan, A. F. (2017, 18 April). Tragedi Si Miskin: Penjara Dulu, Keadilan Kemudian. Diakses 26 Oktober 2025, dari DetikNews situs web: <https://news.detik.com/berita/d-3477130/tragedi-si-miskin-penjara-dulu-keadilan-kemudian>
- Kartodirdjo, S. (1984). Pemberontakan Petani Banten 1888 (Diterjemahkan oleh Kartodirdjo, S.). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kholil, A. (2023). Konsep Humanisme Ali Syari'ati dan Implikasinya pada Kemerdekaan Belajar. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23877/>
- Maliki, N. (2020). "Pendidikan Humanistik Ala Ali Syari'ati". *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* (3): 1-21. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v3i1.2847>
- Negara, M. A. P., & Muhlas. (2023). "Prinsip-prinsip humanisme menurut Ali Syari'ati". *Jurnal Riset Agama* 3 (2): 357–371. <https://doi.org/10.15575/jra.v3i2.19936>
- Nirwansyah, P. (2019). "Ali Shariati dan Tugas Cendekiawan Muslim".
- Rohman, M. F. (2025, Agustus). Aksi rakyat: Bentuk Protes Terhadap Ketidakadilan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Diakses 26 Oktober 2025, dari NU Online situs web: <https://www.nu.or.id/nasional/aksi-rakyat-bentuk-protes-terhadap-ketidakadilan-ekonomi-sosial-dan-politik-CxGKY>

- Shofa, M. (2012). Manusia dalam Perspektif Eksistensialisme: Studi komparatif Soren Kierkegaard dan Ali Syari'ati. <http://digilib.uinsa.ac.id/>
- Ummah, S. S. (2020). "Teologi Pembebasan Ali Syari'ati (Kajian humanisme dalam Islam)". *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 2 (2): 179–190. <https://jurnalfuad.org/index.php/ishlah>
- Yuwono, A. A. (2022). "Relevansi Teologi Pembebasan Ali Syari'ati: Mengatasi Kemiskinan Umat Islam di Indonesia: Sebuah Pendekatan Reflektif". *Media Jurnal Filsafat dan Teologi* (6): 113-131. <https://doi.org/10.53396/media.v6i1.493>
- Zaman, A. R. B. (2021). "Humanistik dan Teologi Pembebasan Ali Syari'ati (Telaah Atas Pemikiran Ali Syari'ati dan Kontribusinya Terhadap Kajian Islam Kontemporer)". *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 20 (2): 86–95. <https://doi.org/10.24014/af.v20i2.11737>